

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### 4.1 Gambaran Umum Partai Hanura

##### 4.1.1 Kelahiran Partai Hanura

Pada masa Pilpres tahun 2004 yang di selenggarakan pada bulan Juli, Golkar yang merupakan partai yang memiliki elektabilitas yang tinggi melaksanakan Konvensi untuk menentukan calon Presiden yang di majukan oleh Partai Golkar. Terdapat 5 nama yang muncul sebagai calon Presiden dari Golkar. Nama tersebut adalah Wiranto, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, Surya Paloh, dan Prabowo Subianto. Saat dilaksanakan konvensi tersebut, Akbar Tandjung unggul dari calon yang lainnya dengan peraihan 147 suara. Sedangkan Wiranto yang ada di nomor urut 2 memperoleh sebanyak 137 suara, Aburizal Bakrie dengan perolehan 118 suara, Surya Paloh dengan perolehan 77 suara, dan Prabowo Subianto di urutan terakhir dengan perolehan 39 suara.<sup>18</sup>

Karena dengan menggunakan aturan yang sudah disepakati, bahwa jika tidak adanya suara yang mayoritas sebanyak 274 atau 50 persen ditambah 1 suara, maka akan dilaksanakannya putaran kedua. Dengan dilaksanakannya putaran kedua, hanya Akbar Tandjung dan Wiranto yang maju. Pada posisi sementara, Akbar Tandjung memperoleh suara yang lebih banyak dibandingkan dengan suara

---

<sup>18</sup> <https://www.liputan6.com/news/read/76442/wiranto-menang-konvensi-golkar>

perolehan Wiranto di putaran pertama. Yaitu sebanyak 147 suara di banding dengan 137 suara.

Diatas kertas, Akbar Tandjung memiliki suara yang lebih banyak dibandingkan Wiranto karena Aburizal Bakrie dan Prabowo akan memberikan suaranya kepada Akbar Tandjung. Sedangkan Surya Paloh memberikan suaranya kepada Wiranto saat kalah. Juga Akbar Tandjung yang dikenal sebagai ketua partai Golkar yang lebih dikenal dan mengakar dibandingkan dengan Wiranto. Namun pada akhirnya, Akbar Tandjung hanya berhasil mendapatkan suara dari DPD I dan DPP, karena dimata DPD II Akbar Tandjung dikatakan sebagai calon yang kurang “seksi” dibandingkan dengan Wiranto. Juga dengan adanya kasus korupsi Dana Badan Urusan Logistik sebesar 40 Miliar yang merupakan *Track record* buruk.

Pada hasil dari putaran kedua, kedua calon meraih suara yang sama besarnya, namun tetap dimenangkan oleh Wiranto dengan perolehan sebesar 315 suara. Sedangkan Akbar tandjung hanya memperoleh 227 suara. Perolehan suara Wiranto berasal dari DPD II dan organisasi kemasyarakatan Golkar yang memiliki hak pilih. Sedangkan Akbar Tandjung hanya memperoleh suara dari DPP dan DPD I.

Memasuki masa Pilpres tahun 2004, Wiranto maju sebagai calon presiden dari Golkar Bersama dengan pasangan Wakil Presidennya, Salahuddin wahid. Calon presiden lainnya yang ikut bersaing pada tahun 2004 adalah; Adburrahman Wahid Bersama Marwah Daud Ibrahim dari PKB, Amien Rais dan Siswano Yudo Husado dari PAN, Hamzah Haz dan Agum Gumelar dari PPP, Megawati dan Hasyim Muzadi dari PDI-P, dan yang terakhir adalah Sulsilo Bambang Yuhdoyono dan JK

dari Demokrat, Partai Bulan Bintang dan Persatuan Indonesia. Namun, pasangan Gus dur dan Marwah Daud dinyatakan tidak bisa mengikuti Pilpres karena tidak lolos dalam tes kesehatan, maka hanya ada 5 calon presiden dan wakil presiden yang maju kedalam Pilpres tahun 2004. Pada putaran pertama, Wiranto mendapatkan dukungan dari partai Golkar, PDK, Partiot, dan PPNU meraih suara sebesar 22,15% selesai di berada urutan ke-3 dibawah Megawati Soekarno Putri dengan perolehan 26,61% dan SBY yang memperoleh 33,57%. Karena suara yang diperoleh tidak lebih dari 50%, maka diselenggarakannya putaran kedua.

Gagalnya Wiranto masuk kedalam putaran kedua merupakan sebuah kegagalan usaha partai Golkar dalam memaksimalkan potensi dari citra yang dimiliki oleh Wiranto pada saat itu. Dimana di rasakan oleh Wiranto bahwa tidak adanya dukungan yang diberikan oleh Partai Golkar untuk memperjuangkan Namanya kedalam putaran kedua. Sedangkan bagi Golkar sudah saatnya untuk partai mencari koalisi pada tahun 2004, karena dengan tidak masuknya Wiranto kedalam putaran kedua, maka sudah sewajarnya,

Partai mencari koalisi yang bisa didukung oleh perolehan suara yang di raih oleh Golkar. Karena, pada akhirnya penentuan koalisi memang wewenang yang dimiliki oleh partai. Karena adanya rasa kecewa Wiranto terhadap Golkar, maka Wiranto memutuskan untuk meninggalkan partai Golkar karena ingin melakukan pengabdian terhadap negara dengan caranya sendiri, dengan membuat Partai Politik baru yang dibentuk pada Tanggal 14 November 2006 yaitu Hanura.

Partai Hanura merupakan partai perpecahan dari Partai Golkar yang didirikan oleh Wiranto beserta petinggi partai lainnya pada tanggal 21 Desember 2006. Partai Hanura didirikan dengan slogan identic yaitu *from zero to hero* dengan harapan dapat menjadi partai yang besar di kemudian harinya. Partai Hanura menganut ideologi Pancasila yang merupakan ideologi dari Negara Indonesia. Didirikan dengan harapan dapat menyalurkan pendapat dan keinginan masyarakat di dalam pemerintahan dan menjalankan fungsi partai politik sebenar-benarnya. Dalam fungsinya sebagai penyalur aspirasi, edukasi politik, dan mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Partai Hanura sejak berdirinya pada tahun 2006, dengan berkembangnya partaidan memasuki tahun 2009 Hanura mengikuti kontestasi politik dengan Wirantosebagai pendamping Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun 2009. Jusuf Kalla dan Wiranto pada tahun 2009 memperoleh suara sebesar 15.081.814 suara, atau hanya dengan 12,41%. Sedangkan pemenang dari pilpres tahun 2009 yaitu pasangan presiden dan wakil presiden SBY dan boediono memperoleh suara sebanyak 73.874.562, atau sebesar 60,80%.

Sedangkan dalam bursa kursi senayan, Hanura memperoleh suara sebanyak 1,3% dibawah Gerindra yang memiliki suara sebanyak 3% dan memiliki jarak yang lumayan jauh dengan pemenang pemilu yaitu partai Demokrat sebanyak 23%. Diluar dari pencapaian Hanura yang hanya memiliki capaian 1,3% di dalam kontestasi politik akbar pada tahun 2009, untuk partai politik yang baru berdiri pada tahun 2009 saat pasangan presiden dan wakil presiden Jusuf Kalla dan Wiranto

selesai di posisi ke 3. Hasil tersebut adalah hasil yang lumayan bagus untuk partai politik yang baru di bentuk pada tahun 2006. Dalam persaingan kursi Legislatifm Hanura berhasil mendapatkan 17 kursi di dalam senayan, yang merupakan pencapaian pada tahun 2009. Kader Hanura yang menduduki kursi DPR RI antara lain, Nurdin Tampubolon, Herry Lotung Siregar, A.Murady Darmansjah, Fauzi Achmad, Ferdinand Sampurna Jaya, Iqbal Alan Abdullah, Erik Satrya Wardhana, Miryam S. Haryani, Susaningtyas N.H. Kertapati, Djamal Aziz, Soemintarsih Muntoro, Sunardi Ayub, Saleh Husin, Rahman Halid, Muchtar Amma, Sarifuddin Sudding dan M. Ali Kastella.

Memasuki tahun 2014, Wiranto Bersama pasangannya Hary tanoe memberanikan diri untuk maju kedalam Pemilu pada tahun 2014. Walaupun di tengah jalan Hary Tanoe memutuskan untuk mundur dari calon pendamping Wiranto sebagai wakil presidennya, dan pada akhirnya Wiranto memutuskan untuk tidak mencalonkan diri sebagai presiden RI. Walaupun Wiranto mengurungkan niat untuk maju kedalam kontestasi politik akbar tersebut, namun elektabilitas partai Hanura mencapai angka 7,5%.

Berada di nomor urut empat dibawah PDIP dengan 26,7%, partai Gerindra 26,6%, dan Partai Golkar sebanyak 14,8%. Dan elektabilitas yang berkembang dari 1,6% menjadi 7,5% menghasilkan Hanura berhasil menduduki kursi senayan sebanyak 16 kursi yaitu, Nurdin Tampubolon, Rufinus Hotmaulana Hutauruk, Samsudin siregar, Fauzih H. Amro, Franz agung Mula Putra, Moh. Arief S.Suditmo, dadang Rusdiana, Djoni Rolindrawan, Miryam S Haryani, Dossy

Iskandar Prasetyo, M. Farid Al Fauzi, Inas Nasrullah Zubir, Lalu Gede Syamsul Mujahidin, Ferry Kase, Safiruddin Sudding, Dewie Yasin Limpouw.

Pada tahun 2016, ketua umum Partai Hanura, Wiranto mendapat panggilan dari presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM menggantikan Luhut Pandjaitan yang dialihkan menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Pada tahun itu Wiranto mengundurkan diri sebagai ketua umum Hanura dan digantikan dengan plt partai, dan dipilihnya Oesman Sapta Odang sebagai penerus Wiranto di dalam MUNAS pada tahun 2016.

Namun, kepemimpinan Oesman Sapta Odang mengalami banyaknya permasalahan karena banyaknya pandangan kader yang mengatakan bahwa Oesma Sapta Odang memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter dan banyaknya pimpinan di DPD dan DPC Hanura digantikan dengan orang dekatnya Oesman Sapta Odang.

Konflik internal mulai terjadi saat nama Daryatmo mulai muncul sebagai ketua umum yang baru dan ingin menggantikan posisi Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum. Walaupun sudah adanya MUNASLUB yang diselenggarakan oleh kubu Daryatmo, Oesman Sapta Odang masih tidak mengakui adanya kepengurusan daryatmo karena SK yang sah adalah nama Oesman Sapta Odang.

#### **a. Visi**

Partai Hanura menyusun rencana yang akan dilaksanakannya dengan tujuan terwujudnya Indonesia sebagai Negara yang berdaulat, adil dan Makmur.<sup>19</sup>

### **b. Misi**

Misi merupakan sebuah upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang sudah di tetapkan. Untuk menyapai hal tersebut, maka misi tersebut sebagai berikut

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Membuat pemimpin yang bertaqwa, jujur, berani, tegas, aspiratif dan mampu menjalankan tugas dengan senantiasa mengedepankan hati Nurani.
3. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945 dengan tujuan agar terwujudnya keadilan dan kepastian hukum untuk melindungi kehidupan rakyat, bangsa dan negara.
4. Membangun sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berwawasan nasional.

---

<sup>19</sup> AD/ART PARTAI Hanura 2019-2024

5. memberikan kesempatan yang tidak berbeda kepada kaum perempuan dan generasi muda pada posisi strategis untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
6. Memiliki tujuan untuk membangun system perekonomian yang berkeadilan, dengan tujuan untuk menguatkan perekonomian masyarakat, dan memberikan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
7. Untuk mencapai Negara Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat, maka perlu adanya pembasmian terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme secara total.
8. Untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka perlu adany perkembangan Otonomi Daerah guna mempercepat pembangunan.

**c. Logo Partai Hanura**





#### 4.1.2 Utusan Hanura di DPR RIa.

Tahun 2009-2014

No	KADER Hanura DI DPR RI TAHUN 2009-2014
1	Nurdin Tampungolon
2	Herry Lotung Siregar
3	A.Murady Darmansjah
4	Fauzi Achmad
5	Ferdinand Sampurna Jaya
6	Iqbal Alan Abdullah
7	Erik Satrya Wardhana
8	Miryam S. Haryani



<b>9</b>	Susaningtyas N.H. Kertapati
<b>10</b>	Djamal Aziz
<b>11</b>	Soemintarsih Muntoro
<b>12</b>	Sunardi Ayub
<b>13</b>	Saleh Husin
<b>14</b>	Rahman Halid
<b>15</b>	Muchtar Amma
<b>16</b>	Sarifuddin Sudding
<b>17</b>	M. Ali Kastella

**b. Tahun 2014-2019**

<b>No</b>	<b>KADER Hanura DI DPR RI TAHUN 2014-2019</b>
<b>1</b>	Nurdin Tampubolon
<b>2</b>	Rufinus Hotmaulana Hutauruk
<b>3</b>	Samsudin siregar

<b>4</b>	Franz agung Mula Putra
<b>5</b>	Moh. Arief S. Suditmo
<b>6</b>	Dadang Rusdiana,
<b>7</b>	Miryam S Haryani
<b>8</b>	Dossy Iskandar Prasetyo
<b>9</b>	Djoni Rolindrawan
<b>10</b>	Fauzih H. Amro
<b>11</b>	Inas Nasrullah Zubir
<b>12</b>	Lalu Gede Syamsul Mujahidin
<b>13</b>	Ferry Kase
<b>14</b>	Safiruddin Sudding
<b>15</b>	Dewie Yasin Limpouw
<b>16</b>	M. Farid Al Fauzi

**c. Tahun 2019-2024**

Tidak ada

Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2009 sampai ke tahun 2014 merupakan era kepemimpinan Wiranto di Hanura. Yang dapat dilihat bahwa partai yang dikenal sebagai partai baru pada tahun 2006 mampu memasuki dan menduduki kursi senayan sebanyak 17 kursi pada tahun 2009. Dan pada tahun 2014 juga Hanura masuk kembali kedalam senayan dengan jumlah sebanyak 16 kursi. Dapat dikatakan bahwa di masa kepemimpinan Wiranto bahwa adanya kestabilan dalam usaha partai untuk memasuki dan turut andil dalam pembangunan negara dengan masuknya kader-kader Hanura di kursi DPR. Namun melihat pada tahun 2019, Hanura tidak mendapatkan kursi satu pun. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana Hanura terus masuk dan mendapatkan kursi DPR namun, pada tahun 2019 usaha Hanura untuk memasuki senayan berujung mendapatkan 0 kursi. Turun drastisnya partai Hanura menjadi sebab dan akibat dari konflik internal partai Hanura yang berpuncak pada tahun 2018. Karena adanya kepengurusan yang bersitegang dan mengakibatkan adanya kepengurusan ganda yaitu kepengurusan yang sah secara SK, Oesman Sapta Odang sebagai ketua umum. Dan kepengurusan yang dinaikkan karena banyaknya kader Hanura yang menginginkan perubahan di dalam struktur kepengurusan yang ada, dan pergantian ketua umum yang baru, yaitu Daryatmo yang di motori oleh Sarifuddin Sudding.

#### **4.1.2 Struktur Kepengurusan Hanura di Tingkat Pusat**

Seperti setiap kepengurusan yang ada di dalam seluruh organisasi atau partai, Hanura memiliki komposisi kepengurusan yang bertujuan untuk menjalankan visi dan misi partai. Selain menjalankan visi dan misi partai, kepengurusan tersebut

juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi partai politik secara keseluruhan. Dengan harapan dapat menjalankan kewajibannya, dan menjalankannya dengan baik. Adapun Struktur kepengurusan partai Hanura periode 2019-2024.

### **Dewan Penasihat**



<b>Ketua</b>	<b>: Prof Dr. Azzam Sam Yasin, M.B.A</b>
wakil Ketua	: Dr. Anwar Fuadi
Wakil Ketua	: Sutomo
Wakil Ketua	: Kol. TNI (Purn) Sri Rudina
Wakil Ketua	: Drs. Potsdam Hutasoit
Wakil Ketua	: Henri Tirayoh
Wakil Ketua	: Sumardjo, S.E.
Wakil Ketua	: Iwan D. Hanafi
Wakil Ketua	: Pierre Dermawan
<b>Sekretaris</b>	<b>: Hasanuddin Nasution, S.H., M.H.</b>
Wakil Sekretaris	: Karjan Supendy, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris	: Ronny Sapulete, S.H., M.H.
Anggota	: Bona Tobing
Anggota	: Dr. Hj. Yayah Yarotul Salamah
Anggota	: Zaini Ahmad S.RK

Anggota : Syarifudin  
 Anggota : Drs. Haris Harahap  
 Anggota : Asmaredy, S.H., M.M  
 Anggota : Diyen Hasanuddin  
 Anggota : Ratna Esther Lumban Tobing  
 Anggota : Retna R. Situmorang, S.Sos., M.Si  
 Anggota : Ghanty Sahabudin, S.H., M.H.

**Dewan Kehormatan**

**Ketua** : **Irjen Pol. (Purn) Marwan Paris,**  
**M.B.A.**  
 Wakil Ketua : DR. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.  
 Wakil Ketua : Brigjen. TNI Abdul Salam  
 Wakil Ketua : DR. Ir. Benny Pasaribu, M.Ec  
**Sekretaris** : **Drs. Muhammad Fahmi, M.M.**  
 Wakil Sekretaris : Darwis Darlis

**Dewan Pimpinan Pusat**

**Ketua Umum** : **Dr. Oesman Sapta**  
 Wakil Ketua Umum Harian : H. Herry Lotung Siregar  
 Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi : Benny Rhamdani  
 Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan : Mayjen, TNI Sumiharjo Pakpahan  
 Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi : Djafar Badjeber  
 Wakil Ketua Umum Bidang Agama : DR. KH. Arwani Syaerozi, Lc., M.A

**Sekretaris Jendral**

**: Kodrat Shah**

Wakil Sekretaris Jendral

: Drs. Zuhendri Chaniago

Wakil Sekretaris Jendral

: Drs. Berny Tamara

Wakil Sekretaris Jendral

: Ir. Hj. Tari Siwi Utami

Wakil Sekretaris Jendral

: Indah Sri rezeki, S.T

**Bendahara Umum**

**: Halim Shahab S.H., M.B.A**

Wakil Bendahara Umum

: Tellie Gozalie

Wakil Bendahara Umum

: Ir. Tunra Meliala

Wakil Bendahara Umum

: Vityas Ratih Putri

Wakil Bendahara Umum

: Sarah Syahazad<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup> SK Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Periode 2019-2024